

ABSTRAK

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat saat ini. Adanya penyalahgunaan obat merupakan salah satu pelanggaran kemanusiaan yang dapat berdampak pada hancurnya generasi bangsa. Sanksi pidana bagi pengedar obat-obatan terlarang sebagai bentuk penyalahgunaan yang tanpa memiliki kemampuan dalam bidang pengobatan maupun tidak memiliki izin edar dalam hal ini bagaimana proses peradilan pidana dilaksanakan dengan ketentuan pidana tersebut berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan aspek pidananya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis: (1) implikasi aspek pidana dalam implementasi Undang-undang Kesehatan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang, (2) proses hukum dengan pertimbangan hakim terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang dalam menjatuhkan putusan vonis, serta (3) kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur aspek pidana yang dapat menjerat pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang antara lain Pasal 196 serta Pasal 197. (2) Proses hukum yang mana memperlihatkan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan vonis pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang pada contoh kasus putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk yang mana terdakwa mengedarkan secara transaksi jual beli berupa 2 (dua) bungkus yang masing-masing berisi 100 (seratus) biji berlogo LL yang mengandung *triheksifenidil HCl*. (3)

Kendala yang dihadapi majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang berupa saksi yang tidak hadir dan memberikan keterangan palsu di persidangan, terdakwa tidak berkata jujur dan tidak mengakui perbuatan dalam persidangan, serta kurangnya alat bukti.

Kata Kunci : Aspek Pidana, Penyalahgunaan, Obat-Obatan Terlarang.

ABSTRACT

Abuse of illegal drugs is one of the problems that often occurs in today's society. The existence of drug abuse is one of the violations of humanity that can have an impact on the destruction of the nation's generation. Criminal sanctions for drug dealers as a form of abuse without having the ability in the field of treatment or do not have a distribution permit in this case how the criminal justice process is carried out with the criminal provisions based on the implementation of Law Number 36 of 2009 concerning Health with its criminal aspects.

This study aims to determine, examine and analyze: (1) the implications of the criminal aspect in the implementation of the Health Law on perpetrators of drug abuse, (2) the legal process with the judge's consideration of the perpetrators of drug abuse in passing the verdict, and (3) obstacles faced by judges in imposing criminal sentences on perpetrators of drug abuse.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) Law Number 36 Year 2009 concerning Health which regulates criminal aspects that can ensnare criminals against drug abusers, including Article 196 and Article 197. (2) The legal process which shows consideration judges in giving criminal verdicts against perpetrators of drug abuse in the example of the decision case Number 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk in which the defendant circulated a buying and selling transaction in the form of 2 (two) packs each containing 100 (one hundred) seeds bearing the LL logo containing trihexyphenidyl HCl. (3) Constraints faced by the panel of judges in imposing a criminal offense against the perpetrators of the crime of drug abuse in the form of witnesses who were not present and gave false information at the trial, the defendant did not tell the truth and did not admit his actions in the trial, and the lack of evidence.

Keywords: Criminal Aspects, Abuse, Illegal Drugs.